

Legislator Singkawang Diperiksa

PONTIANAK. Penanganan kasus hukum dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar baru menjerat satu tersangka. Namun penyidik Polda memastikan masih akan memeriksa sejumlah saksi untuk membongkar keterlibatan tersangka lain.

"Rencananya hari ini (kemarin, red) kita akan memeriksa anggota DPRD Kota Singkawang. Tapi pemeriksaan belum bisa dilaksanakan karena beliau sedang ada agenda sidang," ujar AKBP Mukson Munandar, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar menjawab Equator, Rabu (11/5).

Mukson tidak menyebutkan nama maupun inisial siapa anggota DPRD Singkawang yang hendak diperiksa itu. Namun kemungkinan legislator yang dimaksud adalah Zainal Abidin. "Dulunya dia di DPRD Kalbar. Pemeriksaan terhadap dia kemungkinan baru bisa kita laksanakan lima hari lagi karena dia minta diundur lima hari," ucap Mukson.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Singkawang, Zainal Abidin menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009. Ia terakhir duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi pembangunan.

Surat panggilan terhadap Zainal Abidin dikirimkan Polda Kalbar, Senin (9/5) lalu. Surat panggilan itu dibuat menyusul terbitnya izin pemeriksaan dari Gubernur terhadap yang bersangkutan. "Surat izin pemeriksaan dari Gubernur diterima Jumat (6/5) lalu," beber perwira dengan pangkat dua melati di pundak itu.

Sekadar mengingatkan, mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2009, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2009.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan

Legislator Singkawang

.... . dari halaman 1

pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses

oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON

XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Sejauh ini kasus Bansos baru menjerat mantan wakil bendahara KONI, Iswanto sebagai tersangka. Namun Mukson menegaskan pihaknya masih menunggu izin pemeriksaan dari presiden terhadap Usman Dja'far dan Zulfadhli.

"Nanti kalau semuanya sudah diperiksa, akan dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara itu akan terlihat apakah ada penambahan tersangka lagi atau tetap satu tersangka," pungkasnya.

Dikonfirmasi Equator via selulernya, Zainal Abidin mengaku

sudah mengetahui gubernur menyetujui izin pemeriksaan dirinya. "Saya diberita tahu Ketua DPRD Singkawang. Tapi sampai sekarang saya belum menerima panggilan pemeriksaan dari Polda," ujar Zainal kepada Equator, tadi malam.

Anggota Komisi C DPRD Singkawang dari PPP ini mengaku siap memberikan penjelasan ke Polda. "Saya siap datang. Tidak ada masalah," katanya.

Zainal mengaku tidak mengetahui soal aliran dana Bansos KONI yang dikabarkan dipakai oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalbar. "Saya tidak tahu soal dana itu. Yang jelas, anggaran di DPRD Kalbar ada bagiannya tersendiri yang mengurus," tukas Zainal. (bdu)